

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka yang berangkat dari kepedulian terhadap tingginya angka kekurangan gizi dan stunting di Indonesia. Prabowo mulai menggagas program makan gratis ketika menemukan data bahwa sekitar 30% anak Indonesia usia di bawah lima tahun mengalami stunting pada 2006. Hingga menjelang implementasi MBG, angka stunting Indonesia pada 2024 berada pada angka 14% (Kiftiyah dkk., 2025). Program ini direalisasikan dengan Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan pada Peraturan Presiden (PERPRES) No. 83 tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memiliki 2 tujuan utama yaitu, meningkatkan gizi kualitas Sumber daya Manusia (SDM) melalui perbaikan gizi dan memberikan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi daerah dengan melibatkan UMKM, petani, dan produsen lokal sebagai *Stakeholder* dalam penyediaan bahan pangan hingga perlengkapan produksi.

Program makan sekolah telah lama menjadi instrumen kebijakan publik di berbagai negara dalam mengatasi masalah gizi sekaligus meningkatkan partisipasi pendidikan. Di India, program Mid-Day Meal Scheme yang kini terintegrasi dalam POSHAN Scheme mulai diperluas

secara nasional sejak 1995 sebagai respons terhadap tingginya angka malnutrisi dan putus sekolah. Program ini dikelola secara kolaboratif antara pemerintah pusat, negara bagian, serta komunitas lokal dengan sistem penyediaan makanan di sekolah berbasis dapur terdesentralisasi. Sumber pendanaan berasal dari anggaran pemerintah pusat dan daerah, dengan dukungan logistik dari sektor lokal. Secara substansial, program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada pemerataan akses pendidikan dan penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan pemasok bahan pangan (Chakraborty & Jayaraman, 2019). Sementara itu, di Finlandia, kebijakan Free School Meal Finland telah diterapkan sejak 1948 sebagai bagian dari sistem negara kesejahteraan (welfare state), di mana seluruh siswa mendapatkan makan siang gratis tanpa diskriminasi. Pengelolaannya terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional dengan pendanaan penuh dari pajak negara, serta standar gizi yang ketat. Studi menunjukkan bahwa program ini berkontribusi signifikan terhadap kesetaraan sosial dan peningkatan hasil belajar siswa (Sarlio-Lähteenkorva & Manninen, 2010).

Di Amerika Latin, Brasil mengembangkan Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) sebagai program makan sekolah nasional yang memiliki karakteristik kuat dalam integrasi ekonomi lokal. Program ini telah berjalan sejak 1950-an dan dikelola oleh pemerintah federal dengan implementasi di tingkat daerah, serta didanai melalui anggaran publik nasional. Salah satu ciri utama PNAE adalah kewajiban penggunaan

minimal 30% bahan pangan dari petani lokal, sehingga menciptakan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat (Sidaner dkk., 2013). Di sisi lain, Jepang melalui sistem Kyushoku mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dengan mengintegrasikan makan sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter dan budaya. Program ini mulai berkembang pasca World War II sebagai upaya pemulihan gizi anak-anak, dengan pengelolaan yang melibatkan pemerintah daerah, sekolah, serta partisipasi orang tua dalam pembiayaan bahan makanan. Secara substantif, Kyushoku tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial, disiplin, dan kebiasaan hidup sehat (Asakura & Sasaki, 2017).

Kembali ke Negara Indonesia, Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Program MBG tergambar melalui pembangunan Satuan Pelayanan Perbaikan Gizi (SPPG) yang sangat masif dan pemberian anggaran “Jumbo” pada tahun 2025. Dilansir dari Economy.Ekozone.co(2025) sudah terdapat 15.369 SPPG per bulan November yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah penerima Layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 41,9 Juta Orang, dari target berdirinya 30.000 SPPG dan 82,9 Juta penerima manfaat pada akhir Tahun 2025. Dari sisi anggaran, Program MBG sudah mencatatkan anggaran yang terealisasi sejumlah Rp41,8 Triliun rupiah atau sebesar 58,2 Persen per 18 November 2025 dari total anggaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebanyak Rp 71 Triliun (Ariesta, 2025). Namun, bukan hanya dari segi

pembangunan SPPG dan pemberian Anggaran “Jumbo” untuk program MBG, Pemerintahan Prabowo-Gibran juga turut Mengajak *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam upaya memberikan *Multiplier Effect* dikelompok masyarakat.

Dalam aspek Ekonomi dan upaya pemberian *Multiplier Effect* pada masyarakat Indonesia, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) merangkul Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Program MBG sebagai *Stakeholder* yang penerima tugas/bantuan/mitra atas kebutuhan bahan pangan, pengelola dapur SPPG, hingga penyediaan barang/jasa. Keterlibatan UMKM dalam Program MBG ini diatur berdasarkan pada peraturan Badan Gizi Nasional (PerBGN) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Gizi Nasional. Peluang Kerja sama yang dibuat oleh BGN sudah terbukti berhasil merangkul sejumlah UMKM di Indonesia, Berdasarkan data yang dilansir dari [antaranews.com\(2025\)](#) per november 2025 terdapat sebanyak 12.740 UMKM yang terlibat menjadi supplier dalam Program MBG (Habibah, 2025). Selain merangkul sektor UMKM, Program MBG turut menyerap tenaga kerja lokal terkhusus untuk operasional Dapur SPPG baik dari Kepala Dapur, Akuntan, ahli Gizi hingga juru masak dan *driver*, dilansir dari [antaranews\(2025\)](#) Program MBG per oktober sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 900 Ribu smpai 1 Juta yang terdiri dari para pekerja operasional SPPG hingga pekerja operasional supplier (Ameliya, 2025).

Dalam temuan penelitian sebelumnya, Program MBG menjadi Upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila khususnya dalam nilai Keadilan sosial. Studi Andin dkk (2024) menyebutkan bahwa Program MBG berpotensi kuat untuk penanaman nilai-nilai keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan sosial melalui pemerataan gizi tanpa memandang status sosial-ekonomi dan mengurangi angka kelaparan pada pelajar di Indonesia (Andin dkk., 2024). Dalam kajian lain yang dilakukan oleh Merlinda & Yusuf (2025) menyatakan bahwa Program MBG yang bertujuan untuk peningkatan Gizi anak-anak Indonesia secara langsung berpotensi untuk peningkatan Konsentrasi Belajar, hingga Respon belajar yang berkorelasi dengan peningkatan Presentasi Akademik, Namun Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh konsistensi pasokan dan kualitas makanan (Merlinda & Yusmar Yusuf, 2025).

Namun dalam sisi lain, capaian kuantitatif dan hasil penelitian sebelumnya tidak diiringi dengan kajian mendalam mengenai kualitas dan makna pemberdayaan ekonomi yang dihasilkan. Keterlibatan UMKM sering kali dipahami sebatas angka partisipasi, tanpa analisis yang komprehensif mengenai sejauh mana program ini benar-benar memperkuat posisi ekonomi UMKM, meningkatkan kapasitas usaha, serta menciptakan relasi yang lebih adil antara negara dan masyarakat dalam rantai kebijakan publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah MBG telah berjalan sesuai dengan tujuan normatifnya sebagai kebijakan yang

berkeadilan sosial, atau justru masih menghadapi kendala dalam penerjemahan nilai tersebut di tingkat implementasi lokal.

Meskipun demikian, kajian akademik mengenai Program MBG hingga saat ini masih didominasi oleh pembahasan aspek gizi, pencegahan stunting, efektivitas anggaran, dan dinamika politik kebijakan. Penelitian yang secara khusus mengkaji MBG sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi UMKM, terutama UMKM dalam rantai pasok bahan pokok makanan yang masih relatif terbatas. Bahkan, studi yang menempatkan konteks lokal seperti pada tingkat kecamatan Pasar Minggu sebagai lokasi analisis implementasi kebijakan nasional hampir belum banyak dilakukan. Padahal, konteks lokal merupakan arena krusial untuk melihat bagaimana kebijakan dirasakan, ditafsirkan, dan dijalankan oleh aktor-aktor di lapangan.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini dilandasi oleh motivasi untuk mengkaji Program Makan Bergizi Gratis secara lebih komprehensif, tidak hanya sebagai kebijakan pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini menawarkan keterbaruan dengan memfokuskan analisis pada dampak MBG terhadap UMKM dalam konteks implementasi kebijakan di tingkat kecamatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian kebijakan publik berbasis nilai Pancasila, serta kontribusi praktis bagi evaluasi dan perbaikan

pelaksanaan Program MBG agar lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini pun relevan dengan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya pada bidang kajian kemasyarakatan. Penelitian ini mengkaji hubungan antara negara, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pelaksanaan kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak warga negara atas pangan bergizi sekaligus memberdayakan masyarakat melalui pelibatan UMKM. Pelaksanaan program tersebut juga menunjukkan praktik kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi tersebut mencerminkan penerapan nilai gotong royong, partisipasi, dan keadilan sosial yang menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila.

B. Masalah Penelitian

Penelitian ini berangkat dari permasalahan utama mengenai kompleksitas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan yang memiliki tujuan ganda, yaitu sosial dan ekonomi. Meskipun MBG menunjukkan capaian kuantitatif yang signifikan dalam pelibatan UMKM dan anggaran di tingkat nasional, terdapat celah kritis pada tataran implementasi lokal. Permasalahan penelitian kemudian terfokus pada dua

area inti yaitu proses pelaksanaan MBG di tingkat kecamatan dan kualitas *outcome* pemberdayaan ekonomi yang dihasilkan.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan menitikberatkan pada pelibatan UMKM dalam implementasi program di tingkat kecamatan.

2. Sub-fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua hal utama untuk mengungkap dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pasar Minggu. Sub-fokus pertama adalah Mekanisme Pelaksanaan MBG dan Relasi Aktor Lokal, yang bertujuan menjelaskan secara rinci bagaimana proses bisnis dari Program MBG. Hal yang akan diteliti mencakup alur kerja SPPG (dapur umum), mulai dari cara pengadaan bahan baku dari UMKM, hingga dinamika kerjasama antara pengelola program dengan UMKM. Dalam sub-fokus ini, kita juga akan melihat tantangan dan kendala apa yang muncul selama proses implementasi program di tingkat kecamatan.

Sub-fokus kedua adalah Kualitas Pelibatan dan Penguatan Posisi Ekonomi UMKM, yang akan mengukur dampak ekonomi dari program MBG. Penelitian ini akan mencari tahu sejauh mana program ini berhasil menciptakan peluang usaha yang adil, meningkatkan kapasitas UMKM

lokal, dan memastikan adanya pemerataan manfaat ekonomi. Intinya, sub-fokus ini menilai apakah program MBG benar-benar memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang terlibat langsung sebagai pemasok dan tenaga kerja, sehingga fungsi pemberdayaan ekonominya tercapai.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tingkat lokal sebagai kebijakan publik?
2. Bagaimana dampak Program MBG dalam mendorong pemberdayaan ekonomi UMKM?

E. Manfaat Penelitian

A. Manfaat teoritis

- a. Memperkaya literatur PPKn, khususnya mengenai hubungan antara kebijakan publik, hak warga negara, dan implementasi nilai Pancasila.
- b. Menambah kontribusi ilmiah mengenai pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya dampak kebijakan sosial terhadap UMKM dan *multiplier effect* ekonomi.
- c. Memperkuat teori implementasi kebijakan, terutama pada level lokal melalui pendekatan teori *Inclusive Development*.

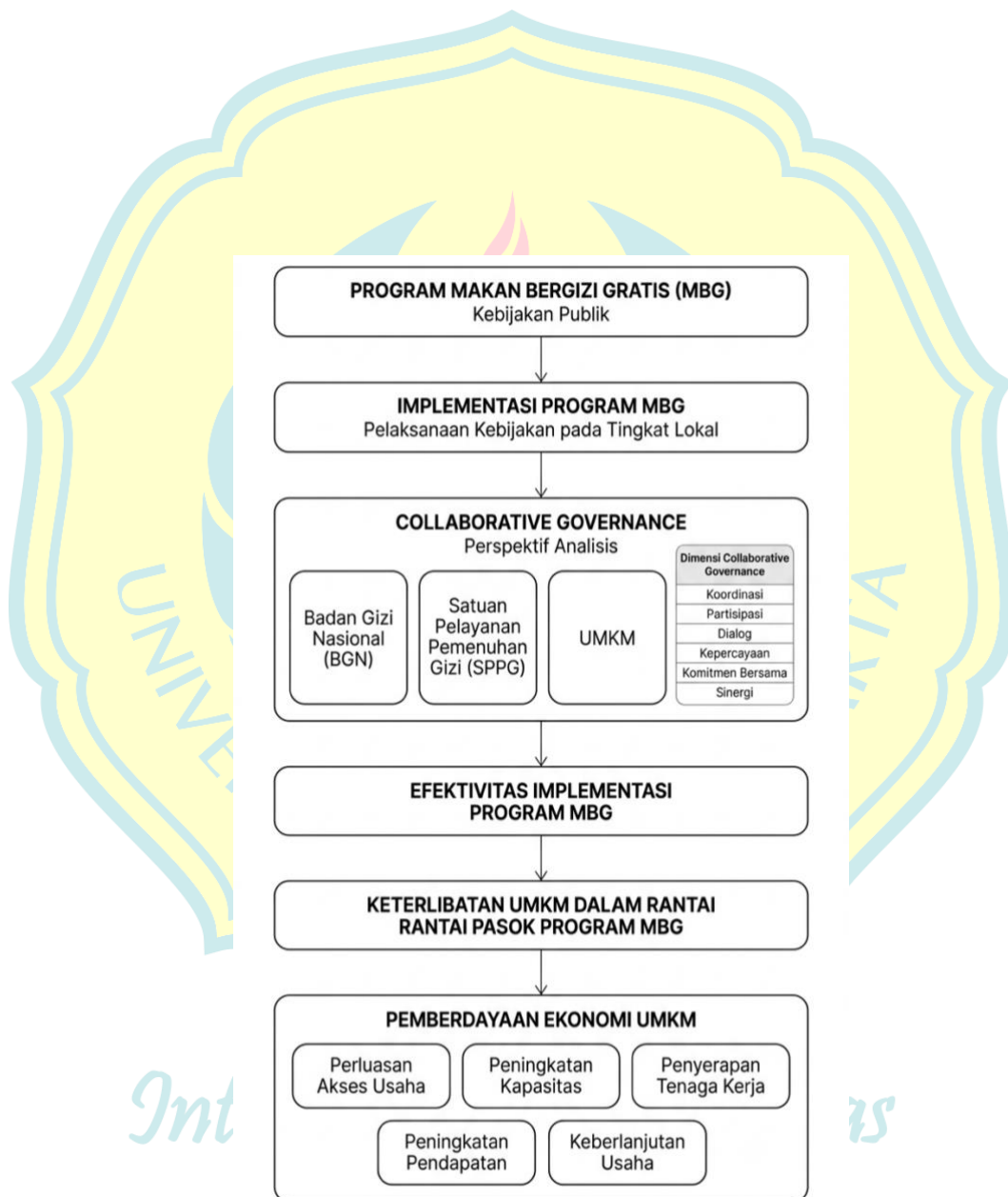
B. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pemerataan, tata kelola, dan pelibatan UMKM dalam program MBG.
- b. Bagi UMKM, penelitian memberikan informasi mengenai peluang ekonomi, tantangan, serta strategi penguatan kapasitas usaha dalam rantai pasok MBG.
- c. Bagi pelaksana program (SPPG), penelitian memberi masukan terkait praktik implementasi yang efektif dan faktor pendukung keberhasilan program.

F. Kerangka Konseptual

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam penelitian ini dipandang sebagai kebijakan publik yang implementasinya melibatkan kolaborasi berbagai aktor seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), UMKM melalui proses Collaborative Governance. Penelitian ini berasumsi bahwa kualitas kolaborasi antarpemangku kepentingan memengaruhi efektivitas implementasi Program MBG. Efektivitas tersebut kemudian menentukan tingkat keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi. Dengan menganalisis implementasi Program MBG melalui dimensi Collaborative Governance untuk memahami bagaimana koordinasi partisipasi dan sinergi antaraktor menghasilkan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan tersebut tercermin dalam perluasan

akses usaha, peningkatan kapasitas, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan keberlanjutan UMKM.



Bagan 1. 1 Bagan Kerangka Konseptual